



# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA**

<sup>1</sup>Riyan Hermawan, <sup>2</sup>Emi Masyitah

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan  
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: [riyanhermawan262@gmail.com](mailto:riyanhermawan262@gmail.com), [emi.masyitah@gmail.com](mailto:emi.masyitah@gmail.com)

**Received:** 2024-01-15, **Revised:** 2024-02-20, **Accepted:** 2024-02-23

## **Abstrak**

Belanja modal merupakan belanja yang paling bermanfaat bagi publik dan daerah. Dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal dalam asset tetap seperti penataan kota, gedung, pembangunan jalan dan irigasi sangat berpengaruh pada produktifitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktifitas perekonomian suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dengan total populasi dan sample sebanyak 30. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil analisis secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil Utara tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.

## **Abstract**

*Capital expenditure is the most beneficial expenditure for the public and the region. With an increase in the allocation of capital expenditure in fixed assets such as city planning, buildings, road construction and irrigation, it has a significant impact on economic productivity because the higher the capital expenditure, the higher the economic productivity of a region. This research aims to determine the influence of local revenue, general allocation funds and profit sharing funds on capital expenditure of the North Sumatra Regional Government. This research uses associative quantitative research methods and descriptive research. The data source used in this research is secondary data. With a total population and sample of 30. The research results show that local revenue and general allocation funds have no effect on capital expenditure, and profit sharing funds have a positive and significant effect on capital expenditure. The results of the simultaneous analysis of local original income, general allocation funds, and North profit sharing funds have no effect on capital expenditure.*



**JURNAL WIDYA** This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



**Keywords:** *Regional Original Income, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds and Capital Expenditures.*

## 1. Pendahuluan

Dianggap sebagai kebijakan yang sangat demokratis, otonomi daerah memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sebenarnya. Menteri Keuangan Budiono menyatakan bahwa tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, mengembangkan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan menjaga hubungan yang serasi antara daerah dan pusat.

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu kemandirian, pemerintah daerah, sebagai kepala daerah, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi daerah mereka. Dengan memiliki kebebasan untuk berinisiatif, pemerintah daerah dapat membuat keputusan sendiri dan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya mereka. Ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Belanja yang paling bermanfaat bagi masyarakat dan daerah adalah belanja modal. Dengan meningkatkan alokasi belanja modal dalam asset tetap seperti penataan kota, gedung, pembangunan jalan, dan irigasi, produktifitas perekonomian secara signifikan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat belanja modal yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan produktifitas ekonomi suatu wilayah. Belanja harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan menghasilkan, seperti melakukan aktivitas pembangunan. Pemerintah daerah dapat melakukan hal-hal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membentuk komposisi belanja pemerintah ini. Tingkat investasi modal yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini fenomena yang terjadi sejak tahun 2012 hingga 2021, belanja modal tidak stabil dan mengalami kenaikan dan penurunan yang drastis dalam beberapa tahun. Hal tersebut karena kurangnya penerapan otonomi daerah sehingga terjadinya kendala dalam pengeloan keuangan, karena pengelolaan keuangan dapat menjadi salah satu tolak ukur kesiapan pemerintah kabupaten/ kota.

Hal ini sejalan dengan Data yang diambil dari Badan pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Medan Perihal Belanja Modal Kota Medan terhadap Anggaran 2012-2021.

**Tabel 1.**  
**Belanja Modal Kota Medan terhadap Anggaran 2012-2021.**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2012	558.428.737.784,00	3.021.172.391.041,67
2013	630.802.958.785,00	3.224.449.048.408,88
2014	783.883.177.721,63	3.723.643.299.085,60
2015	916.888.037.907,78	4.374.968.274.136,94
2016	936.599.131.961,06	4.525.231.330.995,15
2017	997.475.991.902,00	4.394.045.824.264,53
2018	753.996.886.210,07	4.213.480.509.726,24





2019	992.661.245.694,74	5.059.288.700.981,01
2020	308.278.278.057,33	3.991.453.349.313,55
2021	574.604.617.139,00	4.499.145.144.311,87

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan belanja modal, terutama pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebanyak Rp. 684.382.967.637,41. Dan pada tahun 2020 tersebut Penerimaan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan.

Selain itu dari sisi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021-2021 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah yang diterima kota Medan jika dilihat pada table diatas pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan secara keseluruhan pendapatan asli daerah kota Medan tidak pernah memenuhi target yang sudah dianggarkan ini berarti potensi yang ada di kota Medan belum dimaksimalkan secara baik

**Tabel 2.**

**Pendapatan Asli Daerah Kota Medan terhadap Anggaran 2012-2021**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	Rp. 1.594.454.835.916,45	Rp. 1.147.901.461.607,38	71,99%
2013	Rp. 1.578.247.819.724,32	Rp. 1.206.169.709.147,73	76,42 %
2014	Rp. 1.678.116.623.125,00	Rp. 1.384.246.114.729,62	82,49%
2015	Rp. 1.794.704.774.012,45	Rp. 1.489.723.189.088,60	83,01 %
2016	Rp. 1.884.851.580.562,97	Rp. 1.535.259.539.056,01	81,45 %
2017	Rp. 2.031.995.548.717,81	Rp. 1.739.756.922.633,50	85,62 %
2018	Rp. 2.112.663.059.116,00	Rp. 1.636.204.514.683,53	77,45%
2019	Rp. 2.312.760.384.058,00	Rp. 1.829.665.882.248,31	79,11%
2020	Rp. 1.813.909.461.511,16	Rp. 1.509.483.588.167,01	83,22%
2021	Rp. 2.139.239.943.474,00	Rp. 1.906.512.189.047,29	89,12%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses belanja daerah Kota Medan dilakukan secara tidak efisien sehingga anggaran yang diberikan tidak terealisasi dengan baik
- 2) Ditemukan bahwasanya anggaran yang telah ditetapkan namun tidak terealisasi dengan baik
- 3) Terdapat bahwasanya dana alokasi umum yang timbul secara serempak yang tujuannya bukan untuk tujuan kebutuhan Daerah Kota Medan melainkan untuk mendapatkan keuntungan individu.
- 4) Ditemukan bahwasanya terdapat dana pembagian hasil tidak dilakukan secara terstruktur dan juga terorganisir

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah kota Medan
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah kota Medan.
- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah kota Medan





- 4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah kota Medan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademis, pemerintah dan juga praktisi sebagai berikut:

- 1) Bagi akademis, penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan berfikir dalam pengembangan wawasan dibidang pendapatan daerah, dana perimbangan dan belanja modal dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada, dan sebagai salah.
- 2) Bagi Pemerintah dapat memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah.
- 3) praktisi, peneliti dan Pembaca Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu untuk lebih mengetahui bagaimana salah satu kinerja pemerintah daerah

## 2. Tinjauan Literatur

### A. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi, juga dikenal sebagai teori keagenan, menentukan bagaimana perusahaan mengungkapkan laporan tahunan kepada para pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (2018), teori keagenan berpendapat bahwa para pemegang saham tidak memiliki informasi yang cukup tentang kondisi dan kinerja perusahaan. Menurut Hidayat (2018), agen memiliki lebih banyak informasi tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek umum perusahaan.

Ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal, yang menyebabkan asimetri informasi. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi yang berbeda tetapi bekerja sama untuk membagi wewenang yang berbeda menyebabkan masalah keagenan. Karena mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup dan tidak memiliki cukup akses untuk mengelola perusahaan, masalah keagenan ini dapat merugikan pihak prinsipal.

### B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD ialah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, didalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut (Alteng Syafruddin dalam Artha Wulandari, Phaureula dan Emy, 2018). Adapun indicator dari Anggaran Pendapatan Asli daerah diaprokasikan dengan PAD.

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

### C. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana APBD yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Panji (2019). Adapun Indikator dari Dana Alokasi Umum diaprokasikan dengan DAU

$$DAU = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

### D. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi menurut Fernandi & Nur (2019).

Gross Profit Sharing : Persentase Nisbah x laba Kotor

Profit Sharing : Persentase Nisbah x laba Rugi Bersih





## E. Belanja Modal

Belanja Modal Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya untuk memberikan manfaat lain dari satu periode akuntansi Belanja Modal ini berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang dalam pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang menghasilkan Belanja Modal. Menurut (Halim,2018) Adapaun Rumus Untuk menghitung Belanja Modal Sebagai Berikut:

Belanja Modal : Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung Dan Bangunan + Belanja Jalan – Jalan.

## F. Penelitian Terdahulu

Menurut (Sri Mulyati dkk,2019) menyatakan bahwa pendapatan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Secara parsial, dana bagi hasil dan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap kabupaten/kota belanja daerah di Aceh.

Menurut (Siti Aisyah Nasution, 2023) menyatakan bahwa secara parsial, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja kabupaten/kota. Belanja modal di Sumatera Utara.

Menurut (Siti Mundhiroh, 2019) menyatakan bahwa secara parsial baik variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi Daerah maupun DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sementara itu variabel bebas PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Menurut (Endah Ayuning Tiyas dkk, 2022) menyatakan bahwa pendapatan daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Dan Surplus of Financing Budgeting berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Menurut (Dirvi Surya Abbas,dkk, 2020) menyatakan bahwa Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil Daerah (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Menurut (Putri Utami, Emi Masyitah, 2023) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh, Sedangkan retribusi Daerah, Laba BUMD dan Belanja Modal bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh 2011-2020.

## G. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang (Susanti et al., 2016) yang menyatakan PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Dari pernyataan diatas maka peneliti menyimpulkan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal baik secara positif dan signifikan.

### 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004)..





Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Huzaifi, 2017) yang menyatakan adanya pengaruh positif DAU terhadap Belanja Modal. Dari penelitian terdahulu, maka peneliti dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum sangat berpengaruh baik secara positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### 3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang termasuk dalam kelompok transfer pemerintah pusat. Dana bagi hasil dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan daerah penghasil (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2016) yang menyatakan adanya pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Daerah. Dari penelitian terdahulu maka peneliti menyimpulkan bahwa dana bagi hasil juga memiliki pengaruh terhadap belanja modal baik secara positif dan signifikan

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kuantitatif dan pendekatan asosiatif dengan jenis data sekunder yang diambil dari berbagai sumber seperti Jurnal, Buku, atau berbagai bentuk terbitan lainnya. Populasi dalam penelitian ini seluruh jumlah periode pendapatan Daerah Kota Medan periode 2012-2021 yakni sebanyak 30 populasi yang diambil berdasarkan jumlah periode sebanyak 10 tahun di kali dengan variabel dependent Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yang berarti jumlah sampel sesuai dengan jumlah populasi yakni sebanyak 30 sampel.

#### Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Definisi Operasional Dan Aspek Pengukuran Variabel**

Variabel	Defenisi Variabel	Pengukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X <sub>1</sub> )	BD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	PAD = Pajak Daerah+Retribusi Daerah+ Hasil Pengelolaan Kekayaan+ Lain-Lain PAD. (Purnomo, 2019)	Rasio
Dana Alokasi Umum (X <sub>2</sub> ),	na Alokasi Umum (DAU) adalah dana APBD yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Panji (2019).	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal (DJPK, Kemenkeu RI 2017)	Rasio
	Fernandi & Nur (2019), adalah Dana Bagi Hasil	Bagi Hasil = Persentase Nisbah × Laba Kotor	





Dana Bagi Hasil ( $X_3$ )	(DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah	(Wiroso, 2018).	Rasio
Belanja Modal (Y)	nurut (Mursyidi, 2019), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan Dan Mesin + Belanja Gedung Dan Bangunan + Belanja Jalan-Jalan (Halim, 2018)	Rasio

Sumber: data diolah 2023

### Teknik Analisis Data

Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

#### 1) Uji Asumsi Klasik

Bentuk persamaannya sebagai berikut:

- Uji Normalitas
- Uji Multikolinieritas
- Uji Heteroskedastisitas

#### 2) Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini menggunakan teknik regresi linear berganda, karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Berikut bentuk persamaannya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

#### 3) Uji Hipotesis

Bentuk persamaannya sebagai berikut:

- Uji-t (Uji Parsial)
- Uji Simultan (Uji-F)
- Uji Koefisien Determinasi  $R^2$

## 4. Hasil dan Pembahasan

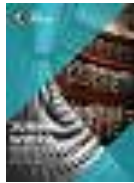
### 1. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1606.00589169
Most Extreme Differences	Absolute	.246
	Positive	.126





	Negative	-0.246
Test Statistic		.246
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* bahwa nilai signifikansi Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,087 lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov diatas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

## b) Uji Multikolinieritas

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		
		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	Pendapatan Asli Daerah	.230	.310	3.224
	Dana Alokasi Umum	.360	.288	3.474
	Dana Bagi Hasil	-.626	.871	1.148

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang disajikan pada tabel diatas, terlihat secara keseluruhan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,01. Sehingga dapat dikatakan bahwa antar variabel independen dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi atau terbebas dari asumsi multikolinieritas.

## c) Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		
		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	-1555.944	3339.523	.658
	Pendapatan Asli Daerah	-3.777	2.829	.230







	Dana Alokasi Umum	6.824	4.100	.147
	Dana Bagi Hasil	-.078	.924	.936
a. Dependent Variable: Abs				

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Dari tabel diatas terlihat bahwa item pernyataan disetiap variabel tidak terjadi heterokedastisitas dengan melihat uji glejser memenuhi ketentuan > dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

## 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2809.857	5599.637		.502	.634
	Pendapatan Asli Daerah	2.100	4.744	.230	.443	.674
	Dana Alokasi Umum	4.578	6.875	.360	.666	.530
	Dana Bagi Hasil	3.124	1.550	.626	2.016	.090
a. Dependent Variable: Belanja Modal						

umber: hasil output SPSS 25.0

Dari tabel diatas, diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

1. Konstanta = 2809,857
2. Pendapatan Asli Daerah = 2,100
3. Dana Alokasi Umum = 4,578
4. Dana bagi Hasil = 3,124

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,154 + 2,100 X_1 + 4,578 X_2 + 3,124 X_3 + e$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :





1. Diketahui nilai konstanta menunjukkan nilai a atau konstanta sebesar 28,0985 yang artinya PAD, DAU dan DBH dalam keadaan konstan adalah 28,0985.
2. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah bahwa nilai koefisien regresi  $b_1 = 2,100$  menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya Belanja Modal (BM) sebesar 21,0%.
3. Nilai Koefisien Variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  $b_2 = 4,578$  menunjukkan apabila Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya Belanja Modal sebesar 45,78%.
4. Nilai Koefisien Variabel Dana Bagi Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  $b_3 = 3,124$  menunjukkan apabila Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya Belanja Modal sebesar 31,24%.

### 3. Uji Hipotesis

#### a) Uji -t (Uji Parsial)

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji-t (Uji Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2809.857	5599.637		.502	.634
	Pendapatan Asli Daerah	2.100	4.744	.230	.443	.674
	Dana Alokasi Umum	4.578	6.875	.360	.666	.530
	Dana Bagi Hasil	3.124	1.550	.626	2.016	.090

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Hasil pengujian statistik t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Nilai  $t_{hitung}$  nilai  $t_{hitung}$   $0,443 < t_{tabel}$   $1,706$  maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H1 ditolak yang berarti secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

#### 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Nilai  $t_{hitung}$   $0,666 < t_{tabel}$   $1,706$  maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H2 ditolak yang berarti secara parsial Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

H2: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

#### 3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Nilai  $t_{hitung}$   $t_{hitung}$   $2,016 > t_{tabel}$   $1,706$  dan didapat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,09 > 0,05$ ), maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H3 diterima yang berarti secara parsial Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal





H3: Dana Bagi Hasil Berpengaruh Signifikan terhadap belanja Modal.

### b) Uji Simultan (Uji-F)

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22833106.391	3	7611035.464	1.967	.220 <sup>b</sup>
	Residual	23214329.609	6	3869054.935		
	Total	46047436.000	9			
a. Dependent Variable: Belanja Modal						
b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum						

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai  $f_{hitung} = 1,967$  sedangkan nilai  $f_{tabel}$  pada F-tabel 0,05 dengan  $n = 25$  diperoleh nilai  $f_{tabel} 2,76$  dari hasil ini diketahui  $f_{hitung} > f_{tabel}$ , yaitu  $1,967 > 2,76$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (X3) secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Kota Medan

### c) Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

**Tabel 10.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 <sup>a</sup>	.496	.244	1966.991
a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum				

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,496 yang berarti 49,6% faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Kota Medan dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan sisanya 53,1% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.





## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan melalui beberapa pengujian seperti regresi secara parsial maupun simultan variabel pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. Maka dapat dipaparkan hasil dari hipotesis secara ringkas sebagai berikut:

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. pada hasil uji hipotesis secara parsial  $-t$  menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$   $0,443 < t_{tabel}$   $1,706$  maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H1 ditolak yang berarti secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. jika pendapatan asli daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Sehingga dana alokasi dana perimbangan yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

H1: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Dana Alokasi terhadap Belanja Modal pada hasil uji hipotesis secara parsial  $-t$  menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$   $0,666 < t_{tabel}$   $1,706$  maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H2 ditolak yang berarti secara parsial Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan masih tingginya dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah kota Medan. Melihat tidak adanya pengaruh dana alokasi umum yang diberikan, maka pemerintah daerah hendaknya berupaya meningkatkan unsur-unsur dalam dana alokasi umum sehingga dana alokasi umum dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya.

H2: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada hasil uji hipotesis secara parsial  $-t$  menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$   $2,016 > t_{tabel}$   $1,314$  dan sig ( $0,09 > 0,05$ ), maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H3 diterima yang berarti secara parsial Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil pengujian uji parsial diketahui bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Medan. Hal ini dikarenakan dimana rata-rata setiap penurunan dana bagi hasil akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dana bagi hasil dibandingkan dana alokasi umum dan dana dana bagi hasil masih relatif kecil terhadap belanja modal. Tujuan utama dana bagi hasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

H3: Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**





Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. pada hasil uji hipotesis secara simultan  $-F_{hitung} > f_{tabel}$ , yaitu  $1,967 > 2,76$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (X3) secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Kota Medan.

Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah daerah agar semakin memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Selain itu peningkatan pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

H5: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh maupun analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Secara Parsial Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal kota Medan.
2. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan bahwa secara parsial Dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal kota Medan.
3. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan bahwa secara parsial Dana bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan
4. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan bahwa secara parsial Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal kota Medan.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Medan, diharapkan agar lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah dalam pengoptimalan peningkatan pelayanan daerah. Dan pemerintah daerah agar lebih menggali potensi yang ada di daerah tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah dan lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD kota Medan
2. Bagi masyarakat kota Medan, diharapkan ikut berpartisipasi dan turut serta dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperluas dan memperbanyak sampel penelitian seperti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara serta memperbaharui periode pengamatan dan penggunaan data yang lebih lengkap dan bervariasi sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya





ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

## Referensi

- [1] Angelina, D. 2020. Pengaruh Pendapatan Modal, Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 4(No. 6).
- [2] Artha Wulandari, Phaureula dan Emy, I. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. CV. Budi Utama. Diakses Februari 2019
- [3] Aruan, L. A. 2010. pengaruh otonomi daerah terhadap belanja modal. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2016(2014), 1–6. Diakses Oktober 2016
- [4] Dwi Anggoro, D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press
- [5] Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. Diakses Januari 2022
- [6] Huzaifi, A. R. Al. 2017. *Strategi Pembinaan Jamaah Umroh Milad dalam Meningkatkan Pemasaran Haji Khsuus pada PT. Tauba Zakka Atkia (Tour and Travel)*.
- [7] Jefri, R. 2018. Theori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI UNIBOS Makasar, Vol. 4*(No. 003).
- [8] Maharani, Y. D. 2021. Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang. *Jurnal IAKP2, Vol. 2*(No. 1).
- [9] Nordiawan, D. dan A. H. 2011. *Akuntansi Sektor Pablik*.
- [10] Panji, I. P. B., & Indrajaya, I. G. B. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 316–337.
- [11] *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006*. (n.d.)
- [12] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. (n.d.)
- [13] Putro, P. U. W. 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. *Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang*.
- [14] Rifai, R. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 5(7), 169–180.
- [15] Sidik, D. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas.
- [16] Sri Rahayu, A. 2007. *Pengantar Kebijakan Fisikal*. Bumi Aksara.
- [17] Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. PT. RajaGrafindo Persada.
- [18] Susanti, S., Fahlevi, H., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. 2016. Halaman 183-191 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.
- [19] Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 340. Diakses April 2022 <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>
- [20] *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.)
- [21] *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. (n.d.)





- [22] Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. 2020. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- [23] Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- [24] Yolanda, W. 2014. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia. *Akuntansi, Program Studi Ekonomi, Fakultas Padang, Universitas Negeri*.

